

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengembangan kewirausahaan menduduki peran yang sangat penting dan semakin signifikan. Suatu kota diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dalam berwirausaha, dan memanfaatkan peluang bisnis dalam dinamika persaingan global. Kota Magelang merupakan kota kecil di Jawa Tengah yang berpotensi dapat mengembangkan kegiatan wirausaha melalui UMKM yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kota Magelang itu sendiri telah terdapat program bernama Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center (Magelang Keren) dari Walikota Magelang yang berfokus untuk dapat menciptakan wirausaha baru. Dalam pengembangannya, sektor wirausaha tidak dapat berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan dan kerjasama dari sektor-sektor lainnya agar dapat tercapai tujuan dan hasil yang maksimal (Rudy, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana keberhasilan dari implementasi program Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center tahun 2022.

Melalui kegiatan wirausaha, hal tersebut merupakan sektor yang paling beragam di seluruh dunia. Banyak negara, terutama negara berkembang memanfaatkan kegiatan wirausaha dan umkm untuk meningkatkan pendapatan daerah (Indah et al., 2018). Masyarakat menganggap bahwa kegiatan umkm adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran dan

mengurangi angka kemiskinan di Kota Magelang. Melalui terciptanya wirausaha baru, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kota Magelang.

Menurut (Hakim & Fafurida, 2018) kegiatan wirausaha merupakan salah satu sumber devisa negara yang sangat potensial yang memiliki pengaruh besar dalam membangun perekonomian. Sektor wirausaha nampaknya memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Kegiatan wirausaha juga menimbulkan efek pengganda baik secara langsung yaitu penyerapan tenaga kerja maupun dampak tidak langsung berupa perkembangan kegiatan ekonomi seperti pelaku UMKM, hotel, rumah makan, jasa transportasi dan lain-lain. Daya tarik dari suatu kota tertentu akan menjadi daya saing apabila lokasi tersebut lebih baik dibandingkan dengan lokasi lainnya.

Karena wirausaha dianggap dapat meningkatkan pendapatan negara, Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk meningkatkannya. Pemerintah Kota Magelang juga berusaha meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan sektor pariwisata. Menurut Peraturan Daerah Kota Magelang No. 2 tahun 2015, pertumbuhan sektor kewirausahaan memiliki peran penting sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, yang berkontribusi pada penciptaan iklim yang sehat dan dinamis melalui pengelolaan kegiatan usaha dan potensi umkm di wilayah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang termuat dalam website Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Magelang, jumlah pelaku UMKM di Kota Magelang pada tahun 2022 terdapat sebanyak 2.030 unit. Persebaran pelaku

UMKM tersebut yaitu di Kecamatan Magelang Selatan terdapat 718 unit pelaku UMKM, Kecamatan Magelang Utara terdapat 570 unit pelaku UMKM, Kecamatan Magelang Tengah terdapat 742 unit pelaku UMKM.

Pemerintah Kota Magelang harus memperbaiki pengelolaan potensi kegiatan umkm yang berada di Kota Magelang agar lebih diminati oleh siapa saja yang berkunjung ke Kota Magelang. Potensi kegiatan umkm ini dapat berkontribusi besar pada pendapatan asli daerah jika dikembangkan dengan baik (Kurniasari & Sari Islami, 2021).

Menurut (Safitri et al., 2020) Kota Magelang akan lebih ditujukan menjadi Kota Jasa dari tahun 2011 hingga 2031. Posisi strategis Kota sebagai pusat jalur ekonomi dan wisata regional dikombinasikan dengan penataan fisik wajah kota akan memberikan potensi yang dominan untuk menegaskan fungsinya sebagai Kota Jasa. Dengan mempertimbangkan potensi pengembangan yang ada di Kota Magelang, wirausaha adalah salah satu bidang yang harus dikembangkan.

Untuk meningkatkan sektor kewirausahaan, Kota Magelang memiliki posisi yang sangat baik. Ini disebabkan oleh (1) lokasinya yang strategis di jalur lintas ekonomi dan transportasi antara Yogyakarta, Magelang, Semarang dan Temanggung, Magelang, Purworejo. Serta sebagai persimpangan jalur wisata lokal dan regional antara Yogyakarta, Borobudur, Kopeng, Ketep Pass, dan Dieng; (2) Kota Magelang merupakan wilayah dataran yang disuguhi dengan pemandangan alam gunung dan pegunungan disekelilingnya yaitu Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Pegunungan Menoreh, Pegunungan Andong dan Pegunungan Telomoyo; (3) memiliki pesona alam Gunung Tidar

sebagai ciri khas Kota Magelang yang dikembangkan menjadi wisata alam sekaligus wisata religi; (4) memiliki potensi air yang melimpah, udara yang bersih dan sejuk ditunjang dengan keberadaan Gunung Tidar yang berfungsi sebagai paru-paru kota, serta lingkungan yang masih terjaga kelestariannya.

Meskipun Kota Magelang memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan kegiatan wirausaha, tetapi masih terdapat permasalahan yang sering terjadi. Permasalahan yang sangat terasa adalah kurangnya SDM atau Sumber Daya Manusia yang belum memadai. Selain masih kurangnya SDM, pengembangan di Kota Magelang masih bersifat individualistik (Sofi & Astuti, 2021).

Berdasarkan permasalahan yang ada, Walikota Magelang dr Muchamad Nur Aziz mempunyai strategi agar pengembangan kegiatan umkm di Kota Magelang dapat terus meningkat dan dapat menciptakan wirausaha baru sebagai salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Magelang. Jika program tersebut dapat berjalan dengan baik, maka kegiatan umkm dan pelaku usaha di kota Magelang akan mengalami perkembangan yang signifikan.

Melihat dari kondisi yang telah terurai di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian Implementasi Program Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center (Magelang Keren) tahun 2022. Untuk itu, penulis ingin mengetahui lebih lanjut apakah dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM di Kota Magelang dengan adanya strategi yang telah diberikan oleh Walikota Magelang. Apakah strategi yang telah diberikan tersebut sudah berjalan dengan optimal atau belum. Seberapa efektifnya dari program tersebut terhadap berlangsungnya kegiatan

pariwisata di Kota Magelang dan tingkat minat wisatawan mengenai hasil UMKM yang telah ada di Kota Magelang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Program Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center (Magelang Keren) tahun 2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk Implementasi Program Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center (Magelang Keren) tahun 2022.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi atau acuan bagi Pemerintah Daerah Kota Magelang untuk meningkatkan potensi wisata yang ada di Kota Magelang. Penelitian ini juga diharapkan dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Magelang dalam menjalankan pengembangan Pariwisata.

Selain dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kota Magelang, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pengelola wisata dalam meningkatkan jumlah pengunjung wisata. Kemudian,

diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi pelaku UMKM untuk dapat terus mengembangkan UMKM dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, penelitian itu diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam mengambil topik masalah mengenai implementasi kebijakan Pariwisata.

## E. Kajian Pustaka

*Tabel 1. Kajian Pustaka*

No	Nama Penulis	Judul dan Nama Jurnal	Hasil
1	Suprani & Zakiah, 2019	Analisis Perkembangan Pariwisata Terhadap Pertumbuhan UMKM di Sumatera Selatan  <i>Jurnal Kompetitif</i>	Potensi wisata yang berada di Sumatera Selatan sangat besar. Ada banyak jenis wisata yang bisa ditawarkan kepada wisatawan, seperti ekowisata, wisata budaya, dan kuliner, pengembangan dari sektor pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan UMKM karena pariwisata melibatkan banyak pihak kegiatan.
2	Amalia & Hanifah, 2022	Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Perkembangan UMKM Pada Kawasan Wisata Pantai Sembilan Sumenep  <i>Jurnal Qawwam: The Leader's Writing</i>	Pariwisata di sekitar pantai Sembilan merupakan sektor andalan dalam kegiatan perekonomian daerah, Pemerintah sadar bahwa kegiatan pariwisata dapat memberikan pengaruh dan dorongan terhadap perkembangan UMKM di sekitar pantai Sembilang.

3	Prasetyo & Suryoko, 2018	Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Perkembangan UMKM Pada Kawasan Wisata Dieng  <i>Diponegoro Journal Of Social And Politic</i>	Pengembangan pariwisata di kawasan wisata Dieng dapat meningkatkan pendapatan UMKM dan dapat menciptakan peluang kepada masyarakat untuk menciptakan usaha baru. Pariwisata dapat meningkatkan kesempatan masyarakat dalam berwirausaha dan mengembangkan usahanya.
4	Niode & Rahman, 2022	Desain Pengembangan Potensi UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Bahari dan Implikasinya Ekonomi Wilayah (Studi di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo)  <i>Jurnal Ketahanan Nasional</i>	Desain pengembangan potensi UMKM berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata Bahari sebagai unggulan daerah di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo dapat dioptimalkan melalui strategi integrasi produk utama pariwisata dan produk UMKM.
5	Novitasari & Wiwin Dwi Wismayanti, 2015	Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Dalam Peningkatan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi	Pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata dalam peningkatan sektor UMKM di Obyek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi berjalan dengan baik. Pelaksanaan peningkatan sektor UMKM dilakukan dengan berbagai program seperti program fasilitasi pengembangan UMKM, pelatihan manajemen dan kewirausahaan, dan pelatihan keterampilan.

		<i>Jurnal Sosial dan Politik</i>	
6	Anggarini, 2021	Kontribusi UMKM Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung 2020 <i>Jurnal Ekombis Review</i>	Kontribusi UMKM pada sektor pariwisata, transportasi, akomodasi, hotel dan restoran berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
7	Rahmad Rahim et al., 2023	Manajemen Pengembangan Sektor Pariwisata Dan Ukm Desa Sungairujung <i>Journal Of Community Service</i>	Penanaman modal adalah salah satu aspek penting dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Namun selama ini terdapat hambatan berupa ketidakpastian hukum tentang dengan perizinan penanaman modal.
8	Tajuddin & Manan, 2017	Model Pemasaran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Online Dalam Mendukung Pariwisata Model Pemasaran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Berbasis Online Dalam Mendukung Pariwisata Dosen Stmik Bumigora Mataram 2) <i>Jurnal Matrik</i>	Aplikasi <i>e-commerce</i> dapat digunakan untuk memudahkan akses pengelola UMKM untuk memperoleh bantuan konsultasi dan advokasi dari berbagai pihak yang terkait. Faktor yang melandasi UMKM terdorong menggunakan <i>e-commerce</i> terdiri dari enam faktor yaitu: mengkases pasar global, mempromosikan produk, membangun merk, mendekati dengan pelanggan, membantu komunikasi lebih cepat dengan pelanggan dan memuaskan pelanggan.

9	Khoiruddin et al., 2022	Optimasi Pariwisata Kreatif Berbasis Integrasi Potensi Lokal Desa Puntukrejo Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa <i>Jurnal Community Engagement</i>	Pembinaan dan pemberdayaan Desa dalam tujuan untuk membuat inovasi pariwisata kreatif guna meningkatkan <i>income generating</i> dan UMKM Desa meningkat <i>skill</i> nya dalam memasarkan hasil produksinya.
10	Rizki et al., 2022	Pemanfaatan Konten Video Dan Media Sosial Dalam Promosi Dan Pemasaran Pariwisata Dan UMKM Di Desa Bantu Rancing Kabupaten Lahat <i>Jurnal Univ.BI Mengabdi</i>	Penggunaan aplikasi konten video dapat dilakukan dalam promosi dan pemasaran pariwisata dan UMKM yang ada. Membuat video singkat dapat dilakukan untuk promosi penjualan atau promosi obyek wisata.
11	Utami et al., 2022	Promosi Pariwisata dan Produk UMKM Kecamatan Tawangmangu Berbasis Video Digital <i>Jurnal Abdimas Prakasa Dakara</i>	Pembuatan <i>website</i> dan media sosial dapat digunakan sebagai tempat promosi dengan unggahan seperti video dan artikel mengenai tempat pariwisata dan produk UMKM Kecamatan Tawangmangu.
12	Soave et al., 2021	Pengaruh Digital Marketing terhadap Peningkatan	Terdapat pengaruh <i>Digital marketing</i> terhadap peningkatan kinerja pemasaran di Kabupaten Toba. Perlu adanya

		<p>Kinerja Pemasaran UMKM Pariwisata di Kabupaten Toba Indonesia <i>Jurnal Ekonomi Bisnis</i></p>	<p>pengoptimalan pemasaran penggunaan <i>digital marketing</i> yang dilakukan oleh pelaku UMKM Pariwisata di Kabupaten Toba agar ada peningkatan pada kinerja pemasaran UMKM.</p>
13	<p>Imaniar &amp; Wahyudiono, 2019</p>	<p>Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) <i>Jurnal Reformasi</i></p>	<p>Produksi pengusaha UMKM di wialayah tersebut masih sangat sederhana dan dengan modal yang minim sehingga sulit untuk mengembangkan usahanya. Perlu adanya dukungan Pemerintah untuk berwirausaha dengan pemberian pelatihan untuk produksi dan pemasaran dari produk yang dihasilkan.</p>
14	<p>Saputro &amp; Dawud, 2021</p>	<p>Strategi Pemulihan Dengan Kerjasama Dua Sektor, Mungkinkan Sektor Pariwisata Dan Umkm Bangkit? (Studi Kasus Umkm Dan Wisata Kabupaten Pacitan) <i>Journal Of Agribussines Science and Rural Development</i></p>	<p>Pemulihan UMKM dapat dilakukan menggunakan cara seperti pemberian pelatihan kompetensi, pengurusan P-IRT dan sertifikasi halal, selain itu dengan penggunaan <i>digital marketing</i> dan mendaftarkan UMKM pada dinas terkait. Kerjasama antara Pariwisata dengan UMKM juga dapat dilakukan dengan cara wisatawan yang berkunjung dan membayar karcis akan mendapatkan produk dari UMKM (harga sudah termasuk di dalamnya).</p>

15	Yudha & Purbadharmaja, 2019	Pengaruh Kontribusi Pariwisata Dan Nilai Produksi Umkm Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi <i>Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana</i>	Pariwisata dan nilai produksi UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pariwisata dan nilai produksi UMKM berpengaruh secara tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi.
----	-----------------------------------	---	---

Berdasarkan penelitian yang saya jadikan referensi atau acuan, ada beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian saya. Penelitian yang ada memang membahas dan memfokuskan tentang pemberdayaan pariwisata di setiap daerah dan dampak terhadap UMKM dari adanya pariwisata tersebut. Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan lebih berfokus pada Implementasi Program Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center (Magelang Keren). Kemudian, yang akan dibahas di penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk implementasi program Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center (Magelang Keren) yang di hadirkan oleh Pemerintah Daerah kepada para pelaku UMKM dan juga dampak yang ditimbulkan dari implementasi program Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center (Magelang Keren).

## **F. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Implementasi Program**

Implementasi kebijakan adalah tahapan penting dalam implementasi kebijakan publik secara keseluruhan. Ini adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Menurut Cleaves (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a process of moving toward a policy objective by mean administrative and political steps*)”.

Menurut (Hamdi, 2014:97), “pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkutan paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”.

Kemudian menurut Wibawa (Tahir, 2014:58), tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

(Nugroho, 2014:657) menyatakan, “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.

Selanjutnya menurut Grindle (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkutan paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin

lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

Kemudian menurut (Mulyadi, 2015:26), “implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”.

Menurut Anderson (Tahir, 2014:56-57), empat hal harus diperhatikan saat menerapkan kebijakan:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi;
2. Hakikat proses administrasi;
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Menurut Matland (Hamdi, 2014:98), “implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*)”.

Sedangkan menurut Jones (Waluyo, 2007:50), “dalam membahas implementasi kebijakan terdapat 2 aktor yang terlibat, yaitu: (1) beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain (2) birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, disamping implementasi”.

Ada empat paradigma implementasi kebijakan, menurut Matland (Hamdi, 2014:98):

1. Konflik rendah-ambiguitas rendah (implementasi administratif).
2. Konflik tinggi-ambiguitas rendah (implementasi politis).
3. Konflik tinggi-ambiguitas tinggi (implementasi simbolik).
4. Konflik rendah-ambiguitas tinggi (implementasi eksperimental).

Selanjutnya menurut Edward III (Mulyadi, 2015:47), “tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat”.

Menurut Mazmanian dan Sebastier (Waluyo, 2007:50), bagian penting dari analisis implementasi kebijakan publik adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal selama proses implementasi secara keseluruhan. Faktor-faktor ini termasuk:

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
- b. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
- c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Mazmanian dan Sebastier (Tahir, 2014:56) menambahkan, “implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target”.

Menurut Udoji (Mulyadi, 2015:46), “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan”.

Menurut (Waluyo, 2007:50-57), implementasi kebijakan berarti menerjemahkan kebijakan publik. Ini biasanya terdiri dari pertanyaan umum yang mencakup tujuan dan sasaran untuk program-program yang lebih operasional, juga dikenal sebagai program aksi. Tujuan dari program-program ini adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Menurut Huntington (Mulyadi, 2015:24), perbedaan paling signifikan antara negara-negara adalah kemampuan mereka untuk menjalankan pemerintahan, bukan ideologi atau bentuk politiknya. Kemampuan dalam menerapkan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh kabinet, presiden, atau Lembaga negara menunjukkan tingkat kemampuan itu.

Kemudian menurut Abidin (Tahir, 2014:57), implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan 2 faktor utama, yaitu :

1. Faktor internal yang meliputi (a) kebijakan yang akan dilaksanakan, dan (b) faktor-faktor pendukung:
2. Faktor eksternal yang meliputi (a) kondisi lingkungan, dan (b) pihak-pihak terkait.

Sedangkan menurut Wahab (Tahir, 2014:55), bahwa implementasi kebijakan adalah: pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Kemudian menurut Tachjan (Tahir, 2014), “implementasi kebijakan public, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administasi public sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan public, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu”.

Implementasi kebijakan adalah proses penerapan kebijakan melalui pelaksanaan kegiatan yang akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan (Maulidah & Megawati, 2022). Pada dasarnya, implementasi adalah rangkaian tindakan atau tindakan yang harus dilakukan oleh para implementor untuk mencapai tujuan kebijakan (Mulyadi, 2015 in Maulidah et al., 2022).

Setelah ditetapkan aturan yang sah dari suatu kebijakan, tindakan yang dikenal sebagai implementasi kebijakan mencakup mengelola input untuk menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat. Ada perbedaan antara tahap pembuatan kebijakan dan tahap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan memiliki logika *top-down*, dengan pilihan kebijakan abstrak atau makro dipotong menjadi tindakan konkrit atau mikro. Sebaliknya, pembuatan kebijakan adalah proses yang memiliki logika *bottom-up*, karena proses

kebijakan dimulai dengan menyampaikan aspirasi, permintaan, atau dukungan masyarakat (Wibawa, 2015).

Sebagaimana dinyatakan oleh (Grindle, 1980), implementasi adalah prosedur umum dari tindakan administrasi yang dapat dipelajari pada tingkat program tertentu. Menurut Van Meter dan Horn, implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok, baik oleh pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan. Grindle menyatakan bahwa tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai tujuan tersebut, maka proses implementasi baru akan dimulai.

Implementasi sebagai dari upaya untuk menciptakan suatu hubungan yang memungkinkan kebijakan bisa terlaksana sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Upaya tersebut dibuat dengan tujuan untuk dapat menghasilkan hasil akhir yang telah direncanakan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diartikan ke dalam sebuah program yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Secara singkat, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan untuk mewujudkan hasil akhir yang diinginkan.

Menurut (Mulyadi, 2015) Implementasi adalah istilah yang mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan dalam suatu keputusan. Salah satu tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengubah keputusan tersebut menjadi pola operasional, serta untuk melakukan perubahan yang signifikan atau kecil sesuai dengan keputusan sebelumnya.

Pada dasarnya, implementasi adalah upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program diterapkan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan Lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya, tetapi juga jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Secara praktis, ini adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahap, termasuk peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata dari keputusan yang diinginkan atau tidak, dampak yang diharapkan instansi pelaksana, dan upaya untuk memperbaiki kebijakan atau peraturan.

Teori yang dibangun oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn membentuk model pendekatan implementasi kebijakan yang dikenal sebagai A Model of the Policy Implementation (1975). Proses implementasi adalah abstraksi kebijakan yang pada dasarnya dilakukan secara sengaja untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksanaan, dan kinerja kebijakan publik, dan menjelaskan bahwa banyak variabel yang saling berkaitan dan variabel-variabel memengaruhi kinerja kebijakan.

### **1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan**

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan menghitung jumlah dana tujuan kebijakan yang realistis dengan kondisi sosio-kultur di tingkat pelaksanaan kebijakan. Jika ukuran dan sasaran kebijakan

terlalu ideal (utopis), direalisasikannya akan sulit. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, para pelaksana kebijakan harus mencapai standar dan sasaran tertentu. Kinerja kebijakan pada dasarnya adalah penilaian tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Sangat penting untuk memahami tujuan kebijakan dan standar secara keseluruhan. Implementasi kebijakan mungkin gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*) tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan. Ini karena standar dan tujuan kebijakan sangat terkait dengan disposisi atau sikap para pelaksana (*officials*). Arah disposisi para pelaksana (*officials*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga sangat penting. Implementasi kebijakan mungkin gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*) tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan.

## **2. Sumber daya**

Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Seperti yang kita ketahui, banyak faktor yang menjadi sumber daya utama, tetapi manusia adalah sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana diketahui, sumber daya finansial adalah sumber daya yang berfokus pada uang atau dana. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Meter dan Van

Horn, 1974) bahwa: “*New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*”.

Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa: “sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan”.

### **3. Karakteristik organisasi pelaksana**

Agen pelaksana termasuk organisasi formal dan informal yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Hal ini penting karena efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang tepat dan cocok dengan agen pelaksananya. Pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin diperlukan karena konteks kebijakan yang akan diterapkan pada beberapa kebijakan. Pada situasi lain, agen pelaksana yang demokratis dan persuasif diperlukan. Dalam menentukan agen pelaksana kebijakan, luas wilayah juga menjadi pertimbangan penting. Fragmentasi dan prosedur-prosedur kerja standar, atau SOP, adalah dua ciri utama struktur birokrasi, menurut Edward III.

a. *standard Operating Procedures (SOP)*.

SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personal baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

b. *Fragmentasi*

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

#### **4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana**

Kegiatan yang baik membutuhkan komunikasi. Menurut Van Horn dan Van Meter, para implementor harus memahami standar tujuan agar kebijakan publik dapat diterapkan dengan efektif. Dalam penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan, khususnya tentang standar dan tujuan, komunikasi harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber, yang berarti informasi harus akurat dan berasal dari sumber yang dapat diandalkan. Untuk mengelola komunikasi yang baik, perlu diciptakan dan dibangun jalur komunikasi yang berfungsi. Semakin banyak saluran komunikasi yang dibangun, semakin besar kemungkinan perintah akan diteruskan dengan benar dan tepat.

Komunikasi membutuhkan perintah yang akurat dan mudah dipahami. Akan sulit untuk mencapai jika standar dan tujuan kebijakan tidak jelas, konsisten, dan konsisten. Dengan adanya kejelasan seperti itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang harus mereka lakukan untuk memenuhi harapan tersebut. Komunikasi dalam organisasi publik, seperti pemerintah daerah, seringkali merupakan proses yang sulit dan kompleks. Seringkali terjadi distorsi, baik yang disengaja maupun tidak, selama proses pentransferan berita ke bawah di dalam organisasi atau dari organisasi ke organisasi lain dan ke komunikator lain. Jika berbagai sumber komunikasi memberikan interpretasi standar dan tujuan yang berbeda, pelaksana kebijakan akan menemukan lebih sulit untuk menerapkan kebijakan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, kesuksesan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan. Selain itu, koordinasi merupakan mekanisme yang efektif untuk implementasi kebijakan; semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin kecil kesalahan.

## **5. Disposisi atau sikap para pelaksana**

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn: “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Pandangan mereka tentang kebijakan dan bagaimana kebijakan itu memengaruhi kepentingan mereka dan organisasi mereka memengaruhi mereka. Van Meter dan Van Horn (1974) menjelaskan bahwa disposisi implementasi kebijakan dimulai dengan penyaringan (*filtering*) persepsi pelaksana (*implementor*) dan hingga batas mana kebijakan dilaksanakan.

Tiga jenis respons dapat memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk menerapkan suatu kebijakan. Yang pertama adalah pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) tentang kebijakan. Yang kedua adalah bagaimana respons mereka menerima,

netral, atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*) dan yang ketiga adalah intensitas terhadap kebijakan. Sangat penting untuk memahami tujuan kebijakan dan standar secara keseluruhan. Karena, bagaimanapun berhasilnya implementasi kebijakan, implementasi kebijakan dapat gagal atau tertekan jika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga penting. Dikarenakan mereka menolak tujuan suatu kebijakan, implementasi kebijakan dapat gagal (Van Meter dan Van Horn, 1974).

Pada akhirnya, tingkat disposisi para pelaksana (*implementor*) memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya tingkat disposisi ini dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan kebijakan.

## **6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik**

Terakhir, penting untuk mempertimbangkan seberapa besar pengaruh faktor eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik. Hasil implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak baik dapat menjadi sumber masalah kegagalan pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, upaya pelaksanaan kebijakan membutuhkan lingkungan eksternal yang baik agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lancar dan terkendali.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup

antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil jika program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga indikator implementasi program, yaitu :

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Program integrasi yang dibentuk oleh pemerintah secara langsung diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dalam melakukan aktivitas pariwisata dan mengoptimalkan kegiatan UMKM secara baik. Masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola program yang telah diselenggarakan oleh pemerintah mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap implementasi dan pengawasan. Tahap implementasi ini merupakan

faktor penting karena memiliki tujuan untuk mengukur keberhasilan pada suatu program. Menurut Pertiwi dan Megawati (2021), implementasi kebijakan ialah sesuatu yang substansial, yakni suatu kebijakan bisa dikatakan berhasil sesuai programnya apabila memiliki indikator selaku petunjuk pada proses implementasi dijalankan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Padabain dan Nugroho (2018), ada empat faktor yang dapat mendukung keberhasilan implementasi yakni:

- a) Sumber daya, guna untuk memastikan kesuksesan dalam proses penerapan kebijakan yang terdiri dari sumber daya manusia dan non manusia. Kesuksesan penerapan kebijakan mengandalkan pada kemampuan pelaksana dalam mengelola sumber daya yang ada.
- b) Komunikasi antar organisasi, berjalannya sebuah implementasi secara efektif bilamana dalam ukuran dan tujuan kebijakan mudah dimengerti oleh pelaksana kebijakan sehingga komunikasi menjadi variabel penting karena hal ini yang akan menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan.
- c) Aliran kerja, menjadi variabel utama karena kinerja dari implementasi kebijakan bisa diidentifikasi tingkat kesuksesannya apabila aliran kerja dari kebijakan tersebut jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan.
- d) Disposisi atau pelaksanaan, hal ini terkait dengan sikap atau kecenderungan pelaksana kebijakan yang menyangkut 3 hal penting yaitu respon, kognisi, dan intensitas disposisi.

## **2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil Menengah atau biasa disebut UMKM merupakan salah satu tujuan utama pengembangan di setiap negara. Hal tersebut disebabkan karena besarnya sumbangsih UMKM kepada Negara, khususnya di bidang sosial dan ekonomi. Selain meningkatkan ekonomi nasional, UMKM juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja sektor informal dan pemerataan pendapatan masyarakat di daerah mereka. Pemerintah Pusat dan Daerah juga telah mengembangkan dan menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung UMKM dan mendukung pertumbuhannya yang berkelanjutan. Tujuan dari kebijakan dan program pendukung ini adalah untuk melindungi dan mengembangkan UMKM dengan membuat lingkungan usaha yang baik.

UMKM merupakan salah satu usaha yang dapat membantu Indonesia dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia secara signifikan. UMKM dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM.

Adapun beberapa pengertian UMKM menurut berbagai pendapat yaitu :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
  - a) Usaha Mikro, merupakan bisnis produktif milik individu atau badan usaha milik individu.
  - b) Usaha Kecil, merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari perusahaan.

- c) Usaha Menengah, merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau usaha besar baik secara langsung maupun tidak langsung.

## 2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro memiliki kurang dari 5 orang, usaha kecil antara 5 dan 19 orang, dan usaha menengah antara 20 dan 99 orang.

## 3. Menurut Bank Indonesia (BI)

UMKM adalah perusahaan atau industri dengan mempunyai karakter sebagai berikut :

- a) Modal kurang dari Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- b) Hanya membutuhkan dana Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk satu putaran
- c) Memiliki asset maksimal Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
- d) Pendapatan tahunan Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

## 4. Menurut Keputusan Menteri Keuangan

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan

sebagai individu atau badan usaha yang melakukan bisnis atau kegiatan dengan omset atau penjualan setiap tahun sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) atau aset sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan yang ditempati. Contoh dalam bentuk badan usaha termasuk perusahaan, CV, PT, dan koperasi; contoh dalam bentuk perorangan termasuk pengrajin industri rumah tangga, peterank, nelayan, penjual barang, jasa, dan lainnya.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, kriteria usaha kecil dan menengah (UMKM) digolongkan berdasarkan jumlah aset dan keuntungan yang dimiliki oleh sebuah usaha adalah sebagai berikut:

***Tabel 2. Kriteria UMKM Menurut UU No 20 tahun 2008***

NO	URAIAN	KRITERIA	
		ASET	OMZET
1	Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
2	Usaha kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

*Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2016*

Rahma (2014, as cited in Zahra, 2022), menjelaskan bahwa karakteristik UMKM dibagi menjadi 4 bagian yaitu:

1. *Livelihood Activities*, adalah usaha kecil dan menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah di sektor informal, seperti pedagang kaki lima.

2. *Micro Enterprise*, adalah UMKM yang memiliki ciri-ciri pengrajin tetapi kurang kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, adalah UMKM yang memiliki semangat kewirausahaan dan memiliki kemampuan untuk menerima pekerjaan melalui subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, adalah usaha kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki semangat kewirausahaan dan berpotensi berkembang menjadi usaha besar.

Dalam pelaksanaannya, UMKM itu sendiri memiliki beberapa karakteristik yang telah ada yaitu:

- a. Kualitas yang belum standar. Sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang masih belum memadai. Produk yang dihasilkan masih dalam bentuk handmade sehingga standar kualitasnya masih beragam.
- b. Desain produknya terbatas. Hal tersebut dipicu karena adanya keterbatasan informasi dan pengalaman tentang produk. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, dan sedikit yang berani mencoba desain baru.
- c. Jenis produk terbatas. Biasanya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Ketika ada permintaan model baru, UMKM masih susah untuk memenuhinya. Jikapun menerima, akan membutuhkan waktu yang lama.
- d. Kapasitas dan daftar harga produk yang terbatas. Dengan susahnya menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan.

- e. Bahan baku yang kurang standar. Karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang ada.
- f. Produksi yang belum teratur dan kurang sempurna. Karena produksi yang belum teratur, sehingga produk-produk yang dihasilkan biasanya pada tingkat yang sama.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, berbagai program pengentasan kemiskinan telah dibuat. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia memiliki program dan kebijakan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui kemudahan kredit usaha. Selain itu, golongan ekonomi lemah telah mendapat manfaat dari sektor pajak. Pemerintah telah membedakan jumlah pajak yang harus dibayar oleh berbagai kelas sosial. Kemiskinan yang berkelanjutan akan menyebabkan kesenjangan sosial di masyarakat, yang merusak relasi sosial (Gunawan, 2014).

Dalam kenyataannya, upaya yang telah dilakukan tidak berjalan secara maksimal. Angka kemiskinan tidak menurun dengan signifikan, masih banyak ditemukan orang yang hidup dibawah standar yang layak. UMKM yang berada di daerah masih belum dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sedikitnya hasil produk UMKM unggulan yang dapat bersaing di pasar lokal, maupun pasar internasional. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang ada pada setiap daerah di Indonesia. Hal itu menggambarkan bahwa belum maksimalnya pemberdayaan UMKM di daerah. Dalam upaya untuk mendukung UMKM di daerah, mereka harus bekerja sama untuk mengurangi angka kemiskinan pada suatu daerah. Rakyat menengah kebawah

umumnya memiliki tingkat Pendidikan yang rendah sehingga sulit untuk bersaing dalam dunia kerja. Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan sebagai sarana dalam pengentasan kemiskinan.

Diharapkan pemberdayaan UMKM akan membantu meningkatkan kesempatan kerja dan ekspor, antara lain, dengan meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha, membangun sistem insentif untuk mendorong wirausaha baru yang berfokus pada ekspor, dan meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor untuk produk UMKM. Maka dari itu, UMKM perlu diberikan kemudahan dalam melakukan perizinan usaha yaitu dalam mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perizinan. Di kalangan Angkatan kerja muda, budaya usaha dan kewirausahaan dikembangkan melalui pelatihan, pembimbingan konsultasi dan penyuluhan, serta kemitraan usaha. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu:

1. Menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat untuk memberikan kesempatan usaha yang lebih besar, memastikan keamanan usaha, dan mendorong efisiensi ekonomi;
2. Membangun dan meningkatkan kapasitas lembaga yang mendukung usaha UMKM sehingga mereka dapat memperoleh akses yang lebih besar ke sumber daya produktif dengan memanfaatkan peluang dan sumber daya potensial, terutama sumber daya lokal yang tersedia;
3. Meningkatkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM) melalui peningkatan jiwa dan sikap kewirausahaan,

termasuk menggunakan peluang iptek dan memanfaatkan peluang yang terbuka di sektor agribisnis dan agroindustri; dan

4. Pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal, terutama bagi mereka yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, kualitas koperasi ditingkatkan untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati diri mereka dan meningkatkan efisiensi kolektif, khususnya untuk pengusaha mikro dan kecil.

Langkah-langkah pemberdayaan usaha mikro di sektor informal dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha skala mikro:

1. Pengembangan usaha mikro, termasuk yang tradisional;
2. Penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan layanan lembaga keuangan mikro;
3. Penyediaan insentif dan pembinaan usaha mikro; serta
4. Meningkatkan kualitas koperasi sehingga mereka dapat berkembang secara sehat sesuai dengan identitas mereka dan membangun efisiensi kolektif bagi pengusaha kecil dan mikro.

Salah satu masalah utama bagi UMKM di Indonesia adalah kendala internal. Menurut Bank Indonesia, kendala internal termasuk masalah modal, sumber daya manusia, hukum, dan akuntabilitas. Keterbatasan modal dan sumber daya manusia adalah kendala internal yang paling sering dialami oleh pelaku UMKM. Keterbatasan modal menghalangi mereka untuk

mengembangkan bisnis yang mereka miliki. Jika tidak ada modal yang cukup, jumlah produk yang dapat diproduksi menjadi sangat terbatas. Jumlah produksi yang dapat dilakukan juga akan sangat terbatas, dan cakupan pasar yang dapat dicapai juga akan sangat terbatas.

Karena keterbatasan sumber daya manusia dapat mempengaruhi banyak hal dalam operasi bisnis, termasuk kualitas, daya saing, dan jangkauan produk yang dibuat, potensi UMKM tidak dapat dikembangkan sepenuhnya. Salah satu contoh kualitas SDM yang rendah dalam proses produksi adalah manajemen kontrol yang buruk. Manajemen kontrol yang buruk dapat menyebabkan hasil produksi yang tidak konsisten dan produk yang buruk. Selain itu, kurangnya kreativitas SDM dalam proses pengemasan akan menyebabkan hasil kemasan yang tidak menarik dan tidak bertahan lama, sehingga produk UMKM tidak dapat bersaing dengan produk perusahaan besar yang telah ada.

Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang penggunaan teknologi juga akan menyebabkan mereka terbatas pada jangkauan pasar di bidang di mana bisnis mereka beroperasi. Keterbatasan sumber daya manusia dapat menjadi penyebab perusahaan stagnan atau bahkan gagal. Selain kendala internal, bisnis UMKM juga mengalami kendala-kendala eksternal. Menurut Bank Indonesia (2015), kendala eksternal yang dialami oleh UMKM meliputi iklim usaha, infrastruktur, dan akses. Kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM, baik internal ataupun eksternal, harusnya dibantu oleh pemerintah agar industri UMKM yang ada dapat berkembang dan bersaing dengan baik.

## **G. Defisini Konseptual**

Definisi konseptual adalah usaha yang memiliki tujuan untuk menjelaskan batasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lain agar tidak terjadi salah paham dalam mengartikan sebuah konsep yang kemudian akan disampaikan. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah :

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu usaha yang dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia secara signifikan.
2. Implementasi program merupakan penerapan dari proses jalannya sistem yang telah dibuat oleh pemerintah atau swasta yang diarahkan agar terciptanya tujuan yang ingin dicapai dalam keputusan kebijakan.

## **H. Defisini Operasional**

Sugiyono (2012), definisi operasional merupakan penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Karena pada dasarnya variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga baik buruknya suatu pengukuran.

Untuk menetapkan indikator implementasi kebijakan, menurut Edward III (1981: 9-12) dikutip dari (Purwanto & Sulistyastuti, 2012:90) mengidentifikasi adanya 4 faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

**Tabel 3. Daftar Definisi Operasional**

No	Indikator	Parameter
1	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Transmisi Informasi Kebijakan</li><li>- Kejelasan Informasi Kebijakan</li><li>- Konsistensi Informasi Kebijakan</li></ul>
2	Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sumber Daya Manusia</li><li>- Sumber Daya Finansial</li><li>- Sumber Daya Kewenangan</li></ul>
3	Disposisi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemahaman Kebijakan</li><li>- Arah Respon Pelaksana</li><li>- Intensitas Terhadap Kebijakan</li></ul>
4	Struktur birokrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Standard Operational procedure</i> (SOP)</li><li>- Fragmentasi Tekanan diluar Birokrasi</li></ul>

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan untuk meneliti implementasi program Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center (Magelang Keren) tahun 2022 adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi obyek sesuai dengan yang ada. Metode penelitian kualitatif dipilih karena dapat memberikan fakta yang lebih realistis dan nyata. Data utama dari penelitian ini

adalah dari kegiatan dan peristiwa yang diamati langsung di lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah berada di Dinas Pariwisata Kota Magelang, Dinas Perdagangan Kota Magelang, Kebun Raya Gunung Tidar, dan Taman Kyai Langgeng Ecopark. Adanya kegiatan UMKM dari masyarakat merupakan salah satu alasan dalam penentuan lokasi penelitian. Adapun lokasi ini merupakan sasaran dari pemerintah untuk menjalankan program Magelang Keren sehingga lokasi ini sangat cocok dijadikan tempat untuk penelitian.

## 3. Unit Analisa Data

Unit analisa data pada penelitian ini adalah:

***Tabel 4. Unit Analisa Data***

No	Unit Analisa Data
1	Dinas Pariwisata Kota Magelang
2	Dinas Perdagangan Kota Magelang
2	Direktur Utama Taman Kyai Langgeng Ecopark
3	Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar

## 4. Jenis Data

Data primer dan sekunder adalah dua jenis data yang diperlukan untuk penelitian ini.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan melalui metode wawancara dari sumber yang terlibat dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini data primer dihasilkan melalui wawancara responden yaitu Pihak Pengelola Wisata di Kota Magelang, Dinas Pariwisata Kota Magelang, dan Dinas Perdagangan Kota Magelang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tersedia dalam berbagai bentuk seperti data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga sudah siap digunakan dalam statistik. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang sudah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Data ini biasanya terdapat pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diberikan langsung kepada responden. Wawancara dilakukan dengan langsung mendatangi informan kemudian menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan kepada informan.

***Tabel 5. Narasumber Penelitian***

No	Narasumber	Jumlah
1	Umi Runa Hanum selaku pihak Disporapar Kota Magelang	1

2	Aziz Khairiri selaku pihak Disperindag Kota Magelang	1
3	Yhan Noercahyo Wibowo selaku Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar	1
4	Arif Taat Ujianto selaku Direktur Utama Taman Kyai Langgeng Ecopark	1
5	Masyarakat pelaku UMKM baik kerajinan atau makanan olahan	2
Total		6

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melihat dan mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung fenomena apa saja yang terkait dengan implementasi program Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center (Magelang Keren).

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari banyak sumber contohnya seperti jurnal, buku, atau sumber lain yang berhubungan dengan implementasi program Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center (Magelang Keren).

***Tabel 6. Data Dokumentasi***

<b>Nama Dokumentasi</b>	<b>Sumber Dokumentasi</b>
-------------------------	---------------------------

Arsip notulensi pelatihan relawan pokdarwis dengan Pemerintah Kota Magelang	Dokumen Pemerintah Kota Magelang
Jumlah pengunjung obyek wisata perbulannya	Dokumen obyek wisata

## 6. Teknik Analisa Data

Analisa Data Kualitatif merupakan Teknik yang dikerjakan dengan menggunakan data, mengelompokkan data, kemudian di pilah agar menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan pola, menemukan hal penting dan apa yang dipelajari, lalu memutuskan apa yang dapat dibagikan ke orang lain. Langkah dalam teknis analisis penelitian kualitatif dilakukan melalui beberapa langkah yaitu:

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mencari data langsung di lapangan oleh peneliti menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Pengumpulan data tersebut bertujuan untuk mencari data yang berhubungan dengan implementasi program Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center (Magelang Keren).

### b. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses memilih, penyederhanaan, dan transformasi data yang masih kasar yang diperoleh di lapangan penelitian. Proses reduksi

data dimulai sejak peneliti telah memiliki fokus wilayah penelitian di kawasan wisata Kota Magelang.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah hasil atau penjelasan dari hasil penelitian yang berupa informasi yang telah tersusun kemudian dari hasil penelitian tersebut dapat dihasilkan kesimpulan beserta pengambilan tindakan dari hasil penelitian implementasi program Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center (Magelang Keren).

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah proses pencarian makna dari setiap kejadian atau gejala yang didapatkan di lapangan pada saat penelitian, mencatat seluruh pola penjelasan yang ada, alur kausalitas, dan proposisi. Saat penelitian tersebut masih berlangsung, kesimpulan yang telah ditetapkan harus terus menerus diverifikasi agar benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid. Di penelitian ini nantinya akan dihasilkan dari seluruh proses pengumpulan data hingga pencarian data di lokasi penelitian tentang implementasi program Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center (Magelang Keren).